

**PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH DAN KINERJA
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
DI INDONESIA**

DISERTASI



**Sari Rusmita
B3071181004**

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

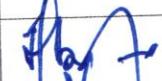
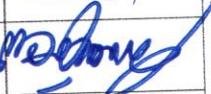
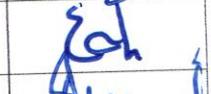
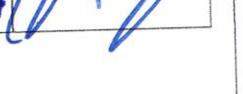
Disertasi dengan judul : Pengaruh Karakteristik Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening

Ini diajukan oleh :

Nama : Sari Rusmita
Jurusan : B3071181004
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Tanggal Ujian : 19 Desember 2024

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Terbuka untuk memperoleh gelar Doktor

TIM PENGUJI

Tim Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Representative Guru Besar/Anggota Penguji	Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA	24/12/2024	
Ketua Sidang/Anggota Penguji	Dr. Barkah, SE, M.Si	24/12/2024	
Promotor/Anggota Penguji	Dr. Haryono, SE, M.Si, Ak, CA, Asean CPA	27/12/2024	
Ko-Promotor/Anggota Penguji	Dr. Windhu Putra, SE, M.Sc	30/12/2024	
Ketua Penguji	Dr. Hj. Yarlina Yacoub, SE, M.Si	23/12/2024	
Anggota Penguji	Prof. Erlina, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CMA., CPA., CSRA., Cert.IPSAS	23/12/2024	
Anggota Penguji	Dr. Jumhur, SE, MSi	27/12/2024	
Anggota Penguji	Dr. Muhsin, SE, MSi, Ak, ACPA	24/12/2024	

Pontianak, 30 Desember 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

Dr. Windhu Putra, SE, M.S
NIP. 1964041281989031004



LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN TERBUKA DISERTASI
DISETUIJI PADA TANGGAL: **19 DEC 2024**.....

Oleh
Promotor



Dr. Haryono, S.E., M.Si., Ak., C.A
NIP 196306301990021001

Ko-Promotor



Dr. Windhu Putra, SE, M.Sc
NIP. 196404281989031004

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak



Dr. Windhu Putra, SE, M.Sc
NIP. 196404281989031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp. (0561) 571512, Fax (0561) 571513
Website: <http://www.pascasarjanafe.untan.ac.id>, Email: mm_feb@untan.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN TERBUKA DISERTASI



Nama : Sari Rusmita
NIM : B3071181004
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Karakteristik Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening

Menyatakan bahwa disertasi tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk ujian terbuka.*

Dosen	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Promotor	Dr. Haryono, SE, M.Si, Ak, CA NIP. 196306301990021001	10/12/2024	
Ko-Promotor	Dr. Windhu Putra, SE, M.Sc NIP. 196404281989031004	6/12/2024	

- Mahasiswa wajib menunjukkan kepada dosen, LEMBAR PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT dengan lampiran hasil cetak pemeriksaan plagiat dari www.plagiarisma.net atau www.smallseotools.com

** Dosen sesuai konsentrasi bidang ilmu

TIM PENGUJI DISERTASI

Telah Diuji Pada Ujian Terbuka

Tanggal : 19 Desember 2024

Ketua : Dr. Barkah, SE, M.Si

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Eddy Suratman, SE, MA
2. Prof. Erlina, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA, CMA, CPA, CSRA,
Cert.IPSAS
3. Dr. Haryono, SE, M.Si, Ak, CA, Asean, CPA
4. Dr. Windhu Putra, SE, M.S
5. Dr. Hj. Yarlina Yacoub, SE, M.Si
6. Dr. Jumhur, SE, M.Si
7. Dr. Muhsin, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, Asean CPA

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Sari Rusmita
NIM : B3071181004
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ilmu Ekonomi
Judul Disertasi : Pengaruh Karakteristik Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber rujukan sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Disertasi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 10 November 2024



(Sari Rusmita)

B3071181004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga disertasi dengan judul "Pengaruh Karakteristik Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Di Indonesia" dapat diselesaikan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Doktor Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis telah menerima dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis (Ruslan HUA dan Nurmiati) yang selalu memberikan dan menyertakan doa serta harapannya setiap langkah kami anak-anaknya, dan kepada Muhammad Lutharif yang selalu memberikan dukungan, semangat dan cinta serta kepada Muhammad Haidar Mutharra dan Radha Athifa Makayla yang selalu mendoakan keberhasilan. Dalam proses ini penulis ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Barkah, SE, Msi sebagai Dekan sekaligus Ketua Sidang Ujian Terbuka, Dr. Haryono, SE, M.Si, Ak, CA, Asean CPA sebagai promotor, Dr. Windhu Putra, SE, M.Sc sebagai co-promotor sekaligus ketua program studi Doktor Ilmu Ekonomi FEB UNTAN, Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA sebagai Representatif Guru Besar, Dr. Hj. Yarlina Yacoub, SE, M.Si sebagai ketua penguji, Dr. Jumhur, SE, MSi, Prof. Erlina, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CMA., CPA., CSRA., Cert.IPSAS, Dr. Muhsin, SE, MSi, Ak, ACPA sebagai anggota penguji, atas arahan, empati dan masukan yang sangat berharga dalam menyelesaikan karya ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr, Nella Yantiana, SE, MM, Ak, CPA, CPM sebagai Ketua Jurusan Akuntansi FEB UNTAN dan Dr. Khristina Yunita, SE, MSi, Ak yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam mendukung proses penulisan ini. Serta teman, dan rekan sejawat, yang telah memberikan dukungan moral maupun materil sepanjang perjalanan akademik ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

Pontianak, 10 Desember 2024

Penulis,

Sari Rusmita

ABSTRAK

Pengaruh Karakteristik Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Di Indonesia

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik daerah yang dilihat dari ukuran daerah dan belanja daerah serta kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 34 provinsi yang ada di Indonesia sebagai sampelnya yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2014-2021 (8 tahun). Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: ukuran daerah dan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan belanja daerah dan rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, ukuran daerah, belanja daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Karakteristik Daerah, Ukuran Daerah, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

ABSTRACT

The Influence Of Regional Characteristics And Regional Financial Performance On Poverty With Economic Growth As An Intervening Variable In Indonesia

This study aims to test and analyze the influence of regional characteristics seen from the size of the region and regional spending and financial performance seen from the effectiveness ratio and efficiency ratio on economic growth and poverty rates in Indonesia. This study uses secondary data from 34 provinces in Indonesia as samples sourced from the websites of the Central Statistics Agency (BPS) and the Audit Board of Indonesia (BPK) for the period 2014-2021 (8 years). The research data was analyzed using path analysis with the SPSS program. The results of this study found that: regional size and efficiency ratio have a significant effect on economic growth in Indonesia, while regional spending and effectiveness ratio do not have a significant effect on economic growth in Indonesia. Furthermore, regional size, regional spending, effectiveness ratio and efficiency ratio have a significant effect on poverty rates in Indonesia through economic growth. While economic growth does not have a significant effect on poverty rates in Indonesia.

Keywords: *Poverty, Economic Growth, Regional Characteristics, Regional Size, Regional Expenditures, Financial Performance, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio*

RINGKASAN

SARI RUSMITA. Pengaruh Karakteristik Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Di Indonesia. Dibimbing oleh HARYONO dan WINDHU PUTRA.

Tingginya angka kemiskinan di suatu daerah berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Penduduk miskin seringkali memiliki pendapatan rendah dan banyak anggota keluarga, sehingga pendapatan per kapitanya juga rendah. Jika di daerah tersebut tingkat pengangguran tinggi, kondisi ini akan semakin memburuk. Kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Ada dua jenis kemiskinan: absolut (tidak bisa melampaui garis kemiskinan) dan relatif (perbedaan pendapatan antara kelompok). Kemiskinan terkait dengan berbagai masalah seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Penyebab kemiskinan antara lain kurangnya pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Masalah kemiskinan harus ditangani bersamaan dengan masalah pengangguran dan pendidikan. Teori fiskal federalisme menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki otonomi, berpartisipasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan kepada masyarakat.

Akuntabilitas mencakup pelaporan keuangan yang transparan dan memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan yang baik akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja keuangan diukur dengan rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target, sedangkan rasio efisiensi membandingkan pengeluaran dan pendapatan. Kemandirian menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai sendiri kegiatannya.

Secara keseluruhan, kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah saling berkaitan dan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi dan lintas sektor diperlukan untuk mengatasi masalah ini supaya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin.

Penelitian ini membahas hubungan antara efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, karakteristik daerah, dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Terdapat variasi kondisi antar provinsi yang mempengaruhi penduduk miskin. Penelitian sebelumnya menunjukkan ada pengaruh karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan pendapatan lokal yang berbeda di seluruh Indonesia. Namun ada juga penelitian yang ada menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai hubungan antara kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dan terdapat peneliti yang menunjukkan hasil tidak konsisten.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran daerah, belanja daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fundamental ekonomi makro dan keuangan daerah di Indonesia khususnya berkaitan dengan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dan secara teoritis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu atau teori yang berkaitan dengan analisis karakteristik daerah, kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Di samping itu pula sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan referensi khususnya dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi. Serta secara praktisi, diharapkan bermanfaat sebagai masukan pemerintah Indonesia dalam merumuskan dan mengambil kebijakan yang berkaitan regulasi mengurangi tingkat

kemiskinan dengan melihat karakteristik daerah, kinerja keuangan daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 34 provinsi yang ada di Indonesia sebagai sampelnya yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2014-2021 (8 tahun). Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan program SPSS.

Adapun temuan dari penelitian ini adalah Hipotesis pertama, ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nilai signifikansi 0,036 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan nilai koefisien bertanda negatif yaitu senilai -0,305, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa ukuran daerah yang pada hal ini dilihat dari total asset yang dimiliki oleh suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, walaupun hubungannya berbeda arah.

Hipotesis kedua, belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nilai signifikansi 0,329 yang lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif yaitu senilai 0,124, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa belanja daerah tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis ketiga, rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nilai signifikansi 0,058 yang lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan nilai koefisien bertanda negatif yaitu senilai -0,146, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa rasio efektivitas tidak selalu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis keempat, rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nilai signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif yaitu senilai 0,229, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hipotesis kelima, ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi. Nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan nilai koefisien bertanda negatif yaitu senilai -0,643, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis keenam, belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi. Nilai signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif yaitu senilai 0,413, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis ketujuh, rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi. Nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan nilai koefisien bertanda negatif yaitu senilai -0,353, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis kedelapan, rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi. Nilai signifikansi 0,014 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif yaitu senilai 0,184, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis kesembilan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Nilai signifikansi 0,757 yang lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan nilai koefisien bertanda positif yaitu senilai 0,018, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Temuan penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk lebih melakukan pemanfaatan aset, daerah dengan banyak aset harus menggunakan aset tersebut untuk mendukung ekonomi, seperti investasi infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah daerah harus efektif dalam mengelola aset dengan melakukan pendataan, penilaian, dan pemanfaatan teknologi. Melakukan evaluasi belanja daerah, belanja daerah harus dievaluasi agar lebih terfokus pada program yang meningkatkan produktivitas. Ini termasuk perencanaan berbasis data, mengurangi pemborosan, melibatkan masyarakat, dan mendukung UMKM. Pengelolaan anggaran efektif, pengelolaan anggaran yang lebih baik akan meningkatkan efektivitas. Prioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat dan tingkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Efisiensi penggunaan anggaran, setiap tahap penggunaan anggaran harus efisien dengan meminimalkan belanja pegawai yang berlebihan dan mengoptimalkan kerjasama untuk memanfaatkan aset yang kurang produktif. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memanfaatkan aset untuk masyarakat, aset daerah harus dikelola untuk mengurangi kemiskinan dengan memanfaatkan aset yang tidak terpakai dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat miskin. Belanja produktif, belanja daerah harus difokuskan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menurunkan kemiskinan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan belanja tersebut. Pengelolaan keuangan daerah, tingkat efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memprioritaskan program produktif dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Rasio efisiensi, pemerintah daerah disarankan untuk mengurangi pemborosan dan fokus pada program berdampak tinggi. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan program. Pertumbuhan ekonomi inklusif, pertumbuhan ekonomi harus memastikan manfaat langsung bagi masyarakat rentan, dengan cara membangun infrastruktur, mengembangkan industri lokal, dan memberikan bantuan modal usaha. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara efektif.

SUMMARY

Sari Rusmita. *The Influence of Regional Characteristics and Regional Financial Performance on Poverty with Economic Growth as an Intervening Variable in Indonesia*. Supervised by Haryono and Windhu Putra.

The high poverty rate in a region affects the purchasing power of the community. Poor people often have low incomes and many family members, so their per capita income is also low. If there is a high unemployment rate in the area, this condition will worsen. Poverty refers to the inability to fulfill basic needs. There are two types of poverty: absolute (not being able to go beyond the poverty line) and relative (income differences between groups). Poverty is linked to various issues such as education, health, and the environment.

The causes of poverty include lack of income, employment, education, and health. The problem of poverty should be addressed along with the problems of unemployment and education. The theory of fiscal federalism states that fiscal decentralization can increase economic growth. It allows local governments to have autonomy, participate, and be financially accountable to society.

Accountability includes transparent financial reporting and allows the public to assess government performance. It aims to improve the quality and transparency of governance, as well as public welfare. The ability of local governments to manage finances is crucial to improving welfare. Good management will contribute to economic growth, reduce unemployment, and lower poverty levels. Financial performance is measured by effectiveness, efficiency, and independence ratios. The effectiveness ratio shows the government's ability to achieve targets, while the efficiency ratio compares expenditure and revenue. Independence shows the extent to which the region can self-finance its activities.

Overall, poverty and regional financial management are interrelated and have a major impact on people's welfare. An integrated and cross-sectoral approach is needed to address this issue in order to improve the quality of life of the community and reduce the number of poor people.

This study examines the relationship between the efficiency of local government financial performance, regional characteristics, and poverty rates in Indonesia. There are variations in conditions between provinces that affect the poor. Previous research shows there is an influence of regional characteristics on financial performance and community welfare. Financial performance can be influenced by each region's ability to increase local revenue which differs across Indonesia. But there are also existing studies that show varying results regarding the relationship between financial performance and economic growth, and there are researchers who show inconsistent results.

This study aims to test and analyze the effect of regional size, regional expenditure, effectiveness ratio, and efficiency ratio on poverty levels with economic growth as an intervening variable. This research is expected to provide a more comprehensive picture of macroeconomic fundamentals and regional finance in Indonesia, especially with regard to poverty and economic growth. And theoretically, the research is expected to contribute to the development of science or theory related to the analysis of regional characteristics, financial performance, economic growth to poverty levels in Indonesia. In addition, as material for further research and as reference material, especially in planning and economic development. As well as practically, it is expected to be useful as input for the Indonesian government in formulating and taking policies related to regulation of reducing poverty levels by looking at regional characteristics, regional financial performance, and increasing economic growth.

This study uses secondary data from 34 provinces in Indonesia as a sample sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and the Financial Audit Agency (BPK) websites in the

period 2014-2021 (8 years). The research data were analyzed using path analysis with the SPSS program.

The findings of this study are The first hypothesis, regional size has a significant effect on economic growth in Indonesia. The significance value is 0.036 which is smaller than the specified significance level of 0.05 with a negative coefficient value of -0.305, thus it can be stated that regional size has a significant effect on economic growth in Indonesia. This indicates that the size of the region, which in this case is seen from the total assets owned by a region, can encourage economic growth, although the relationship is in a different direction.

The second hypothesis, regional spending has a significant effect on economic growth in Indonesia. The significance value is 0.329 which is greater than the specified significance level of 0.05 with a positive coefficient value.

The third hypothesis, the effectiveness ratio has a significant effect on economic growth in Indonesia. The significance value of 0.058 which is greater than the specified significance level of 0.05 with a negative coefficient value of -0.146, thus it can be stated that the effectiveness ratio has no direct effect on economic growth in Indonesia. This indicates that the effectiveness ratio does not always encourage economic growth.

The fourth hypothesis is that the efficiency ratio has a significant effect on economic growth in Indonesia. The significance value is 0.003 which is smaller than the specified significance level of 0.05 with a positive coefficient value of 0.229, thus it can be stated that the efficiency ratio has a direct effect on economic growth in Indonesia.

The fifth hypothesis is that regional size has a significant effect on poverty levels in Indonesia mediated by economic growth. The significance value is 0.000 which is smaller than the specified significance level of 0.05 with a negative coefficient value of -0.643, thus it can be stated that regional size has an effect on poverty levels in Indonesia through economic growth.

The sixth hypothesis is that regional spending has a significant effect on poverty levels in Indonesia mediated by economic growth. The significance value is 0.003 which is smaller than the specified significance level of 0.05 with a positive coefficient value of 0.413, thus it can be stated that regional spending affects the poverty rate in Indonesia through economic growth.

The seventh hypothesis, the effectiveness ratio has a significant effect on poverty levels in Indonesia mediated by economic growth. The significance value is 0.000 which is smaller than the specified significance level of 0.05 with a negative coefficient value of -0.353, thus it can be stated that the effectiveness ratio affects the poverty rate in Indonesia through economic growth.

The eighth hypothesis, the efficiency ratio has a significant effect on poverty levels in Indonesia mediated by economic growth. The significance value is 0.014 which is smaller than the specified significance level of 0.05 with a positive coefficient value of 0.184, thus it can be stated that the efficiency ratio affects the poverty rate in Indonesia through economic growth.

The ninth hypothesis is that economic growth has no significant effect on the poverty rate in Indonesia. The significance value of 0.757 is greater than the specified significance level of 0.05 with a positive coefficient value of 0.018, thus it can be stated that economic growth has no effect on the poverty rate in Indonesia.

The findings of this study provide advice to local governments to better utilize assets, regions with many assets should use these assets to support the economy, such as infrastructure investment and public services. Local governments must be effective in managing assets by collecting data, valuing, and utilizing technology. Evaluating local spending, local spending should be evaluated to be more focused on programs that increase productivity. This includes data-driven planning, reducing waste, involving communities, and supporting MSMEs. Effective budget management, better budget management will increase effectiveness. Prioritize

programs that have a direct impact on the community and increase transparency and accountability in their implementation. Efficiency of budget use, every stage of budget use must be efficient by minimizing excessive employee spending and optimizing cooperation to utilize less productive assets.

In addition, local governments are also expected to utilize assets for the community, local assets must be managed to reduce poverty by utilizing unused assets and ensuring the benefits are felt by the poor. Productive spending, regional spending should be focused on infrastructure, education, and health to reduce poverty. Communities should be involved in planning and monitoring such expenditures. Local financial management, a high level of effectiveness in financial management can help reduce poverty by prioritizing productive programs and increasing community participation. Efficiency ratios, local governments are advised to reduce waste and focus on high-impact programs. Communities should be involved in program planning and monitoring. Inclusive economic growth, economic growth should ensure direct benefits for vulnerable communities, by building infrastructure, developing local industries, and providing business capital assistance. By implementing these suggestions, it is hoped that local governments can effectively improve people's welfare and reduce poverty.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Persetujuan	ii
Tim Penguji Disertasi	iii
Penyataan Bebas Dari Plagiat	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Abstraksi	vi
Ringkasan	viii
Summary	xi
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pernyataan Masalah	14
1.3 Pertanyaan Permasalahan.....	15
1.4 Tujuan Penelitian	15
1.5 Manfaat Penelitian	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	18
2.1.2 Teori Perumbuhan Endogen	21
2.1.3 Teori Ketergantungan	22
2.1.4 Teori Agency	22
2.1.5 Teori KinerjaKeuangan	24
2.1.6 Kemiskinan	26
2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi	31
2.1.8 Karakteristik Pemerintah	39
2.1.9 Kinerja Keuangan Pemerintah	40
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	42
2.3 Kajian Empiris	48
BAB 3 METODE PENELITIAN	52
3.1 Rancangan Penelitian.....	52
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	52
3.3 Variabel Penelitian	53
3.3.1 Klasifikasi Variabel	53
3.3.2 Definisi Operasional Variabel	54
3.4 Teknik Analisis Data	56
BAB 4 ANALISIS HASIL PENELITIAN	62
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	62

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	66
4.2.1 Tingkat Kemiskinan	67
4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi	71
4.2.3 Ukuran Daerah	75
4.2.4 Belanja Daerah	77
4.2.5 Rasio Efektivitas	79
4.2.6 Rasio Efisiensi	82
4.3 Hasil Penelitian	86
4.3.1 Uji Asumsi Klasik	86
4.3.1.1 Uji Normalitas	86
4.3.1.2 Uji Multikolinieritas	88
4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas	89
4.3.1.4 Uji Autokorelasi	90
4.3.2 Regresi Linier Berganda	90
4.3.2.1 Regresi Linier Berganda Persamaan Struktur 1	91
4.3.2.2 Regresi Linier Berganda Persamaan Struktur 2	92
4.3.3 Uji Hipotesis	94
4.3.4 Analisis Jalur	97
4.4 Pembahasan.....	99
4.4.1 Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	99
4.4.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	106
4.4.3 Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	111
4.4.4 Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	117
4.4.5 Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi	123
4.4.6 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi	129
4.4.7 Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi	135
4.4.8 Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi	143
4.4.9 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	151
 BAB 5 PENUTUP	 158
5.1 Kesimpulan.....	158
5.2 Saran	160
 DAFTAR RUJUKAN.....	 163
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Klasifikasi Variabel	54
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	66
Tabel 4.2 Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Provinsi Tahun 2017-2021 (dalam Persen)..	68
Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tahun 2017-2021 (dalam Milyaran Rupiah).....	71
Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Indonesia, Tahun 2017-2021 (dalam persen)	73
Tabel 4.4 Total Aset Provinsi di Indonesia, Tahun 2014 dan 2021 (dalam Rupiah)	75
Tabel 4.5 Belanja Daerah Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)	77
Tabel 4.6 Rasio Efektivitas, Tahun 2014 dan 2021 (dalam Persen)	79
Tabel 4.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi di Indonesia Tahun 2014, 2019 dan 2021 (dalam Rupiah)	81
Tabel 4.8 Rasio Efisiensi (dalam Persen)	83
Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Setiap Provinsi Tahun 2014 dan 2021 (dalam Jutaan Rupiah).....	85
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas Model 1	88
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas Model 2	89
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1	89
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2	90
Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi Model 1 dan Model 2	90
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi	91
Tabel 4.16 Hasil Uji F Model 1	91
Tabel 4.17 Nilai Koefisien Persamaan Struktur 1	92
Tabel 4.18 Koefisien Determinasi	93
Tabel 4.19 Hasil Uji F Model 2	93
Tabel 4.20 Nilai Koefisien Persamaan Struktur 2	93
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Hipotesis Pada Setiap Jalur	95
Tabel 4.22 Pengaruh Kausalitas Antara Variabel Penelitian	97
Tabel 4.23 Tabulasi Silang Total Aset Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia	100

Tabel 4.24 Tabulasi Silang Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia.....	107
Tabel 4.25 Tabulasi Silang Rasio Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia	112
Tabel 4.26 Tabulasi Silang Rasio Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia	118
Tabel 4.27 Tabulasi Silang Total Aset Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Seluruh Indonesia	124
Tabel 4.28 Tabulasi Silang Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Seluruh Indonesia	130
Tabel 4.29 Tabulasi Silang Rasio Efektivitas Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Seluruh Indonesia	137
Tabel 4.30 Tabulasi Silang Rasio Efisiensi Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Seluruh Indonesia	144
Tabel 4.31 Tabulasi Silang Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Seluruh Indonesia.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Dunia.....	5
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indoensia Tahun 2011-2020	8
Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin dan Rasio Efisiensi di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2019	11
Gambar 1.4 Total Aset di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2020.....	12
Gambar 2.1 Skema Lingkaran Kemiskinan	26
Gambar 2.2 Kerangka Proses Berpikir	43
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	44
Gambar 3.1 Diagram Jalur Model Teoretis	57
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018 – 2023 ...	63
Gambar 4.2 Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 13 Tahun Terakhir.....	64
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2023 dalam Jutaan Jiwa	65
Gambar 4.4 Pola Pergerakan Tingkat Kemiskinan, Tahun 2017-2021	70
Gambar 4.5 Pola Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi, Tahun 2014, 2019-2021	74
Gambar 4.6 Uji Normalitas Sebelum Outlier Untuk Model 1	87
Gambar 4.7 Uji Normalitas Setelah Outlier Untuk Model 1	87
Gambar 4.8 Uji Normalitas Untuk Model 2	88
Gambar 4.9 Hubungan Kausal Empiris Antar Variabel Penelitian	97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. (Tikson, 2005). Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai, sehingga hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. (Masruroh dkk, 2014).

Pembangunan adalah tujuan dari suatu negara, dimana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada pembangunannya (Zuhdiyaty dan Kaluge, 2017). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada (Rustam 2010).

Tujuan akhir dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat meningkat, berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro, 2006). Kesejahteraan berkaitan dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin dapat diartikan mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada dalam kategori sejahtera (Maipita;2014).

Menurut Iceland (2013), proses ekonomi mempengaruhi tren kemiskinan dalam dua cara, ini termasuk pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi menentukan kenaikan dan penurunan absolut dalam standar hidup rata-rata individu, dan proposisi bahwa ketidaksetaraan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Mangum, Mangun dan Sum (2003) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan Amerika yang relatif tinggi disebabkan oleh distribusi pendapatan yang kurang merata, pendapatan yang rendah bagi mereka yang kurang siap, dan sistem pendukung pendapatan yang kurang

dermawan. Dalam pandangan ini, tidak adanya perbaikan dalam angka kemiskinan meskipun kondisi kehidupan meningkat disebabkan oleh stagnasi dalam pertumbuhan upah dan meningkatnya ketimpangan (Hoynes, Page, dan Stevens 2006).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya dalam standar hidup minimum, baik yang bersifat material maupun non-material (Reitsma dan Kleinpenning;1994, sejalan dengan pendapat Faturachman dan Marcelinus Molo;1994, Kuncoro;1997, Levitan;1996, Todaro;2006). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Wahyudi, 2019). Kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya (Suparlan, 2012). Masyarakat miskin juga dapat dikatakan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kesehatan yang buruk (Maipita;2014).

Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah yang kompleks dan kronis di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju (Kurniawan, 2007). Kemiskinan sendiri pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et. al. 2016). Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Dan kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Kurniawan, 2007).

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah (Christianto, 2013). Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian. (Zuhdiyaty dan Kaluge, 2017).

Ibn Khaldun mengemukakan, kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh dimensi ekonomi. Dia memprakarsai faktor fundamental seperti yang disebutkan dalam rumusnya $P = f(W; G; N; S; g; J)$ di mana P adalah fungsi dari Kekayaan Bangsa (W), Pemerintah (G), Sumber Daya Manusia (N), Syariah (S), Pertumbuhan (g) dan Keadilan (J) (dalam Affandi dan Astuti (2013).

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena untuk menanggulangi kemiskinan tersebut masalah yang dihadapi tidak terbatas pada halhal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik. Di negara-negara berkembang masih banyak ditemukan kemiskinan yang mencolok, meskipun telah terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan selama lebih dari separuh abad terakhir. Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Kegagalan dalam mengatasi masalah kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat (Todaro, 2010).

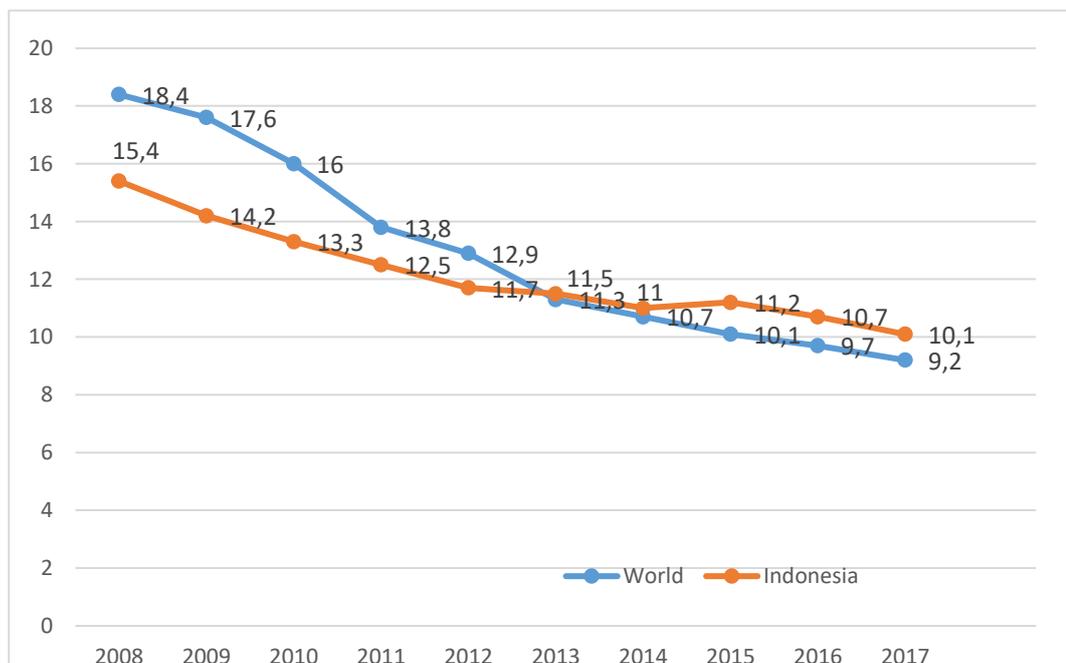
Sementara itu pada negara berkembang, masalah yang timbul adalah “pertumbuhan yang tidak merata” (Ray, 2010). Kebanyakan hanya fokus pada dampak reformasi ekonomi terhadap perubahan ketimpangan pendapatan atau kemiskinan pendapatan (Chaudhuri dan Ravallion, 2006, Ravallion dan Datt, 2002). Fatoni dkk (2019) yang meneliti di 9 negara OKI, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah, keadilan dan pengangguran memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitiannya sejalan dengan Kuncoro (2000), Guiga dan Rejeb (2012), Setyaningsih (2012) dan Affandi dan Astuti (2013).

Sementara itu, Srinivasan dan Bardhan (1974, 1988), Fields (1980), Tendulkar (1998), Deaton dan Dreze (2002), Bhalla (2002) dan Deaton dan Kozel (2005) melakukan penelitian yang memiliki kontribusi dalam menghadapi masalah kemiskinan di India. Panagariya (2008) memberikan perlakuan yang komprehensif tentang kemiskinan pada pertengahan 2000-an yang mengemukakan apakah kemiskinan telah menurun atau tidak pada era pasca reformasi dan apakah reformasi telah berada di balik percepatan tingkat pertumbuhan dan penurunan kemiskinan. Dan beberapa kontribusi dalam Bhagwati dan Panagariya (2012a, 2012b) menganalisis

berbagai aspek kemiskinan di India menggunakan survei pengeluaran pada tahun 2004-2005. Secara khusus, Cain, Hasan dan Rana (2012) mempelajari dampak keterbukaan terhadap kemiskinan, Mukim dan Panagariya (2012) mendokumentasikan penurunan kemiskinan di seluruh kelompok sosial, Dehejia dan Panagariya (2012) memberikan bukti tentang pertumbuhan kewirausahaan di sektor jasa. di antara kelompok yang kurang beruntung secara sosial dan Hnatkovska dan Lahiri (2012) memberikan bukti dan alasan untuk mempersempit ketimpangan upah antara kelompok yang kurang beruntung secara sosial dan kasta atas.

Di sebagian besar desa-desa di India, akses ke banyak fasilitas umum sering kali ditentukan dengan penanda etnis (seperti kasta, agama, dll.) bukan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Sehingga pendapatan yang lebih tinggi tidak selalu dikaitkan dengan pendapatan yang lebih baik. Ini jelas menyoroti kebutuhan untuk fokus pada akses langsung ke barang publik dan akibatnya pembentukan modal sosial (Banerjee dan Somanathan ; 2007), ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bollinger dan Hofstede (1987), dan Davison dan Jordans (1996), bahwa cara individu memandang dan menafsirkan dunia, ditentukan oleh perbedaan budaya. Secara khusus, cara individu mengalami kesejahteraan, dan karena itu kemiskinan, dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya.

Berdasarkan Gambar 1.1 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Indoensia dan dunia pada 10 tahun terakhir dapat dilihat bahwa masih terdapat kemiskinan baik di Indonesia maupun dunia. Tingkat kemiskinan baik di Indonesia maupun dunia dari tahun 2008-2017 mengalami penurunan. Namun di Indonesia sejak pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia berada di atas dunia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki perkembangan perekonomian yang pesat. Namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian tersebut masih ditemukan jumlah penduduk miskin yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal telah banyak dilaksanakan strategi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dari masa ke masa.



Sumber : World Bank dan BPS Indonesia, 2020

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Dunia.

Fenomena dari beberapa negara terbelakang menunjukkan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan malah membuat semakin memburuknya kemiskinan akibat pertimbangan yang tidak memadai atas isu-isu terkait kemiskinan dalam berbagai kebijakan (Rakotovao dan Bockel, 2001; Rougier, 2001). Ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat serta ketepatan pemerintah dalam menentukan program yang tepat untuk pengentasan kemiskinan.

Kegagalan dalam mengatasi masalah kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah telah berupaya serius untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup besar selama ini terhadap upaya penanggulangan kemiskinan baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan maupun kebijakan khusus yang dilaksanakan dengan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan agenda pemulihan ekonomi sesudah krisis 1997 bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota. Pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya melaksanakan

berbagai kebijakan-kebijakan dan program-program dalam penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dalam pokok permasalahan. Masih adanya kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program tersebut lebih berorientasi pada program sektoral, sehingga diperlukan suatu strategi penanggulangan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi agar dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas (Salmirawati, 2008).

Berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek (Purnama, 2016). Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan (Wijayanto, 2010 dan Simatupang dan Saktyanu, 2003). Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan (Azis, 2016).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan berjalan seiring, pernyataan ini didukung juga oleh studi empiris yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan merupakan faktor utama di balik pengentasan kemiskinan (Ravallion & Chen, 2003; Besley & Burgess, 2000; Dollar & Kraay, 2002; 2004 dalam Ningayé et. al., 2006).

Pembangunan daerah tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan (Amijaya, 2008). Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

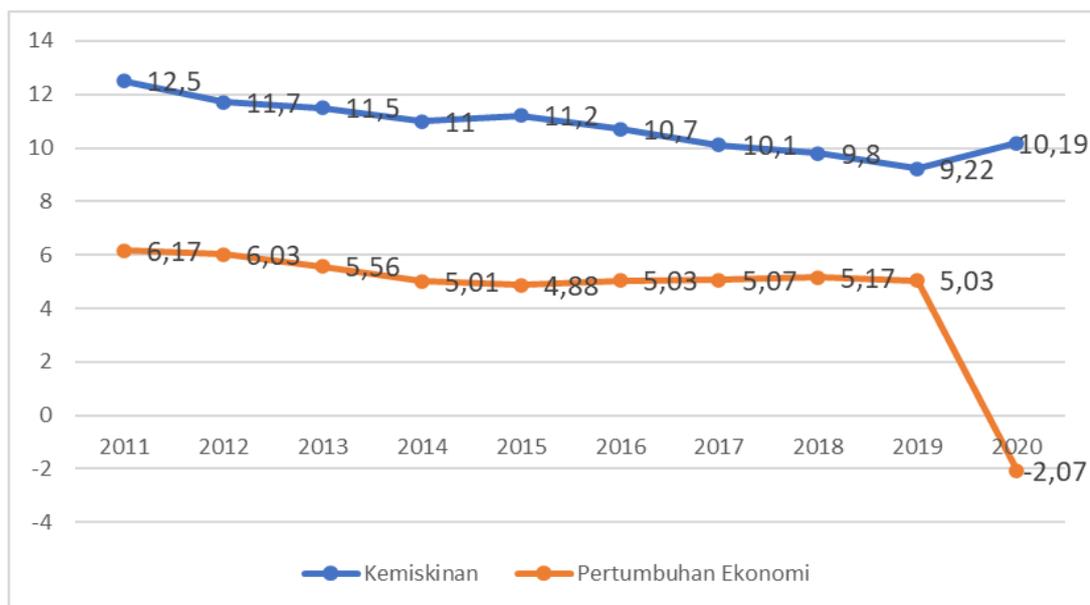
setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk (Esmara, 2000). Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. (Wongdesmiwati 2009).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar dan Wahyuniarti, 2007).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat menghasilkan pendapatan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat, karena dengan distribusi pendapatan masyarakat lebih merata dan meningkatnya taraf hidup masyarakat (Sukirno, 2006:423).

Gambar 1.2 menunjukkan pola pergerakan dari kemiskinan di Indonesia selama 10 tahun dari tahun 2011-2020 yang menunjukkan mengalami penurunan, ini sedikit berbeda pada tahun-tahun tertentu pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan pergerakan yang sebaliknya sehingga fenomena ini memperkuat pernyataan yang mengatakan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berlawanan arah.



Sumber : World Bank dan BPS Indonesia, 2020

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2020.

Tingginya persentase penduduk miskin disuatu wilayah akan berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini karena umumnya pendapatan penduduk miskin tersebut sangat rendah sehingga dari segi pendapatan perkapita juga rendah, apalagi rata-rata jumlah anggota rumah tangga penduduk miskin umumnya lebih banyak dari rumah tangga penduduk tidak miskin sehingga rata-rata pendapatan perkapita penduduk tersebut relative lebih rendah. Keadaan ini akan lebih parah lagi jika tingkat pengangguran di wilayah tersebut juga tinggi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Menurut Rintuh (2003), kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidupnya.

Ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang melampaui garis kemiskinan yang ditetapkan. Sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena

berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2004). Ruggeri (1997) dan Asselin dan Dauphin (2002) dalam Ningaye (2011), mendefinisikan kemiskinan adalah ketika mempertimbangkan utilitas yang dihasilkan dari konsumsi barang dan jasa, mengungkapkan bahwa indikator kemiskinan yang disukai dari kedua aliran pemikiran pada dasarnya adalah indeks moneter, dan juga terbatas pada pendapatan atau pengeluaran.

Rowntree (1901, 2000), Heckman (1981), Sawhill (1988, 1092) dan Immervoll dkk (2014) mengemukakan ketidaksetaraan pendapatan, dan peningkatan ketidaksetaraan pendapatan selama beberapa dekade terakhir telah berhasil meningkatkan kemiskinan bahkan ketika pertumbuhan atau faktor lain bekerja untuk menguranginya. Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Teori fiskal federalisme menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah. Dan pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan yang ada serta dirasakan oleh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud dengan tata kelola keuangan yang baik. Menurut Akai dan Sakata (2002) desentralisasi fiskal adalah pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dalam jangka panjang.

Menurut Astuty dan Fanida (2012) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi

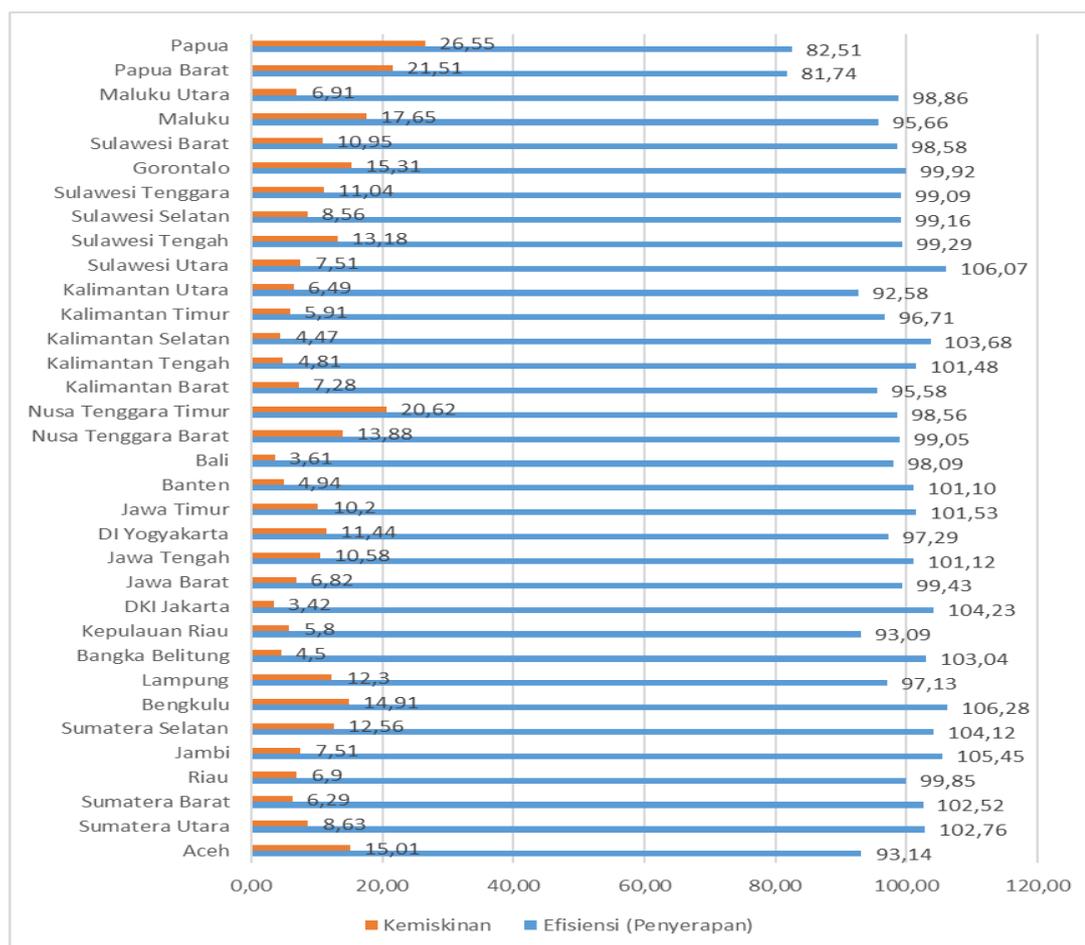
mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga menimbulkan masyarakat yang sejahtera, dengan indicator salah satunya semakin sedikitnya penduduk yang miskin.

Secara umum, tidak ada perbedaan mendasar antara kemakmuran dan kesejahteraan. Namun jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, kemakmuran mempunyai lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan kesejahteraan, karena kemakmuran terdiri dari kesejahteraan ekonomi dan non ekonomi. Sedangkan kesejahteraan dalam beberapa literatur hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah tergantung dari kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Suatu lembaga modern dapat dilihat dari pengelolaan keuangannya. Untuk itu penting sekali bagi daerah untuk mengelola keuangan daerah tersebut dengan baik dan efisien. Karena pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan yang semakin menurun.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran. Kinerja keuangan adalah pengukuran kinerja yang diukur dengan menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur antara lain dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian (Halim, 2007 : 232-234). Rasio efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam realisasi

PAD yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil lokal. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi belanja (pengeluaran) dan realisasi pendapatan lokal. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangaunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah.



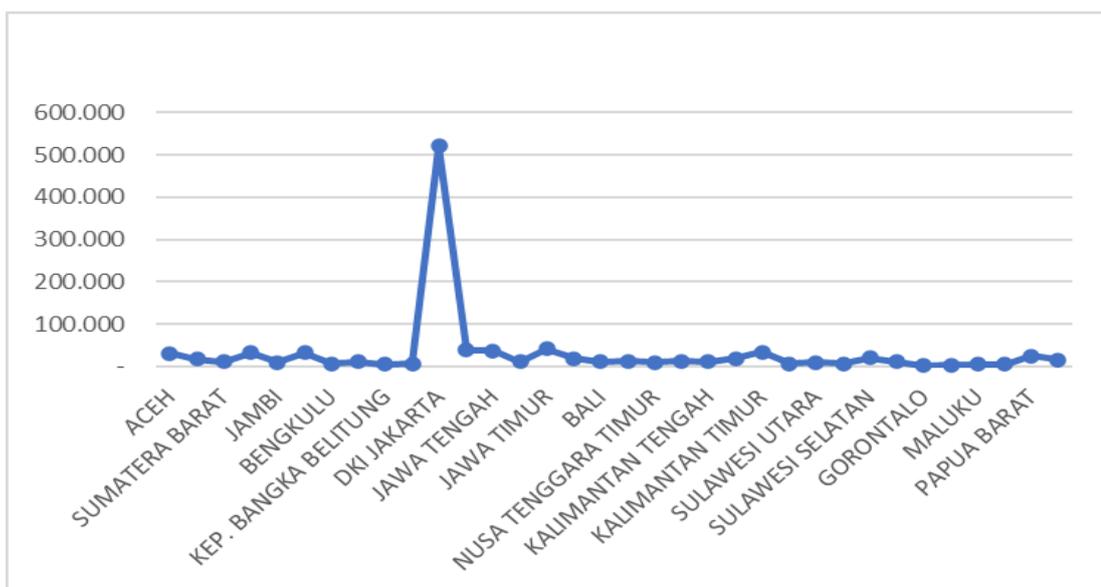
Sumber : World Bank dan BPS Indonesia, 2020

Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin dan Rasio Efisiensi di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2019.

Gambar 1.3 ini menunjukkan rata-rata provinsi yang memiliki rasio efisiensi yang tinggi diikuti oleh semakin rendahnya persentase penduduk miskin dan sebaliknya. Sedangkan seharusnya untuk pencapaian kinerja keuangan, semakin tingginya nilai rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan daerah tersebut semakin

tidak efisien dalam menggunakan dana yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa dalam memperkecil presentasi penduduk kemiskinan diperlukan biaya yang harus dikeluarkan sehingga pemerintah daerah tidak bisa efisien dalam penggunaan dana yang ada karena jika melakukan efisiensi malah tidak dapat menurunkan atau memperkecil persentasi penduduk miskin. Kondisi ini tidak terjadi kepada semua provinsi yang ada di Indoensia. Kondisi seperti di atas dapat terjadi karena setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik daerah yang berbeda seperti jumlah aset yang dimiliki kabupaten/kota, usia pemerintah daerah, kemandirian keuangan pemerintah daerah, status pengakuan nasional wilayah, jumlah penduduk, belanja daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah dan beberapa hal karakteristik daerah lainnya.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Badrudin (2016) yang mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang belum maksimal dapat dikarena masih terdapat daerah-daerah yang mengandalkan keuangan pemerintah pusat, belum mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah, dan masih banyak pengalokasian dana untuk belanja rutin. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang belum maksimal mengakibatkan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan.



Sumber : Sumber : BPK Indonesia, 2020

Gambar 1.4 Total Aset di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2020

Rata-rata asset yang dimiliki ke 34 provinsi di Indonesia berfluktuasi. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki asset daerah yang paling besar dan sangat

mencolok perbedaannya dengan provinsi yang lainnya. Beberapa provinsi memiliki asset yang besar dari pada di provinsi lainnya namun tingkat kemiskinannya masih termasuk tinggi. Ini menunjukkan adanya ketidak maksimalan pemanfaat sumber daya (total asset) daerah yang dimiliki sehingga tidak dapat menunjang penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut, seperti provinsi Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur. Sehingga ini dapat mengindikasikan setiap daerah memiliki cara dan karakteristik yang berbeda dalam pengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah telah dilakukan oleh Patrick (2007), Suhardjanto et.al. (2010), dan Halacmi (2005). Poerwadarminta (2006) mengemukakan bahwa karakteristik yang dimiliki suatu daerah dapat membedakannya dengan daerah lain. Dengan demikian, karakteristik pemerintah daerah adalah gambaran di mana pemerintah daerah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dirinya dengan pemerintah daerah lain.

Karakteristik yang dimiliki pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Bastian (2006) mengatakan kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan, Anzar (2008) mengemukakan kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Smith (1989), Boyne (1997), Carmeli (2002), Gutiérrez-Romero et al. (2010), Atan et al. (2010), Dogariu (2010), dan Upton (2013), Bruijn (2002), Greiling (2005), Nolan, Moore, dan Chan (2004) dan Hamzah (2008).

Hamzah (2008) menjelaskan bahwa terjadi perbedaan dalam kinerja keuangan di setiap wilayah yang berbeda. Selain itu, Halim (2002) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali. Perbedaan kinerja disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan di masing-masing daerah dalam meningkatkan potensi pendapatan lokal. Oleh karena itu, secara otomatis ada perbedaan kemampuan yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Hamzah (2008), Sularso dan Restianto

(2011), Dwirandra (2014), Syamsudin dkk (2015), Astuti (2015), Sari dkk (2009), Yuana (2014), Widodo (2014), Wijaya (2013) dan Berliani dan Riduwan (2017) dalam penelitian mereka, menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hasil penelitian dari Siregar (2016), Smida (2013) dalam Fatoni dkk (2019), Supartoyo dkk (2013) dan Chatami (2014) menunjukkan hal yang tidak konsisten.

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan memasukkan total asset yang dimiliki setiap daerah sebagai salah satu variable yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Melihat fenomena dan penelitian sebelumnya ternyata ada variasi yang tergambar dari data yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kemiskinan, karakteristik daerah, kinerja keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi maka dalam penelitian ini menfokuskan untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik daerah dan kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variable intervening.

1.2 Pernyataan Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi di peroleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro dan Smith, 2008).

Kualitas pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia saat ini masih belum merata. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang dapat dikatakan tinggi, akan tetapi efek masyarakatnya terlalu rendah. Ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin, dimana provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang dapat dikategorikan tinggi tidak dimastikan bahwa persentase penduduk miskin rendah. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik daerah dan kinerja keuangan daerah yang dimiliki daerah tersebut.

Melihat fenomena ini, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan analisa yang lebih mendalam mengenai pengaruh karakteristik daerah dan kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variable intervening di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dari permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
3. Apakah rasio efektivitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
4. Apakah rasio efisien keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
5. Apakah ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi ?
6. Apakah belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi ?
7. Apakah rasio efektivitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi ?
8. Apakah rasio efisiensi keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi ?
9. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh signifikan ukuran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Pengaruh signifikan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

3. Pengaruh signifikan rasio efektivitas keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
4. Pengaruh signifikan rasio efisien keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
5. Pengaruh signifikan ukuran daerah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi
6. Pengaruh signifikan belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi
7. Pengaruh signifikan rasio efektivitas keuangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi
8. Pengaruh signifikan rasio efisiensi keuangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dimediasi pertumbuhan ekonomi
9. Pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara umum penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fundamental ekonomi makro dan keuangan daerah di Indonesia khususnya berkaitan dengan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
2. Secara teoritis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu atau teori yang berkaitan dengan analisis karakteristik daerah, kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Di samping itu pula sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan referensi khususnya dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi.
3. Secara praktisi, diharapkan bermanfaat sebagai masukan pemerintah Indonesia dalam merumuskan dan mengambil kebijakan yang berkaitan regulasi mengurangi tingkat kemiskinan dengan melihat karakteristik daerah, kinerja keuangan daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.